

## Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Using (Studi di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi)

Anastasia Murdyastuti<sup>1</sup>, Suji<sup>2</sup>, Sri Yuniati<sup>3</sup>  
anastasia\_m@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan apa yang dilakukan dalam pengembangan kawasan wisata using di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan potensi wisata using selama ini tidak mampu berjalan optimal karena dalam kebijakannya masih menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, karena pelibatan *stakeholders* diluar pemerintah terutama masyarakat masih sangat kurang. Kebijakan pengembangan wisata haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai sumberdaya lokal dan juga kemampuannya menyediakan tenaga dan modal sosial. *Stakeholders* harus berpartisipasi, kompak dan memberi *multiplier effect* yang luas dalam pengembangan wisata. Kebijakan kepariwisataan yang mampu mendorong proses pengelolaan distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan demokratis serta membuka diri terhadap partisipasi publik dan kontrol publik secara luas atau apa yang diistilahkan dengan *democratic governance* yang melibatkan; 1) Wisatawan, 2) Industri pariwisata, 3) Pendukung jasa pariwisata, 4) Pemerintah, 5) Masyarakat lokal, 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk itu strategi kebijakan *Destination Management Organization (DMO)* merupakan model yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata Using di Kabupaten Banyuwangi. DMO merupakan sistem pengembangan pariwisata terpadu yang memiliki kelengkapan sebagai sebuah sistem. yaitu *coordination tourism stakeholders*, *destination crisis management* dan *destination marketing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMO mampu membangun: 1) Penguatan Gerakan Kesadaran Kolektif *Stakeholder*. 2) Pengembangan Manajemen Destinasi. 3) Pengembangan Bisnis. 4) Penguatan dan Penataan Organisasi. Strategi kebijakan pengembangan wisata using yang berbasis *democratic governance* melalui pengembangan kelembagaan dan kerja sama lintas *stakeholders* melalui konsep *Destination Management Organization* dapat mencapai hasil yang baik.

**Kata Kunci:** Strategi, DMO, pengembangan, Wisata Using

### Abstract

*This study aims to determine what policy strategy is done in the development of tourist area using in Banyuwangi. The development of tourism potentials during this time is not able to run optimally because of its policy still put the government as a dominant actor, because the involvement of Stakeholders outside the government, especially the community is still very less. Tourism development policy should take into account the interest of the community as a local resource and also the ability to provide energy and social capital. Stakeholders must participate, compact and*

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember

<sup>2</sup> Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

<sup>3</sup> Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

provide a broad multiplier effect in tourism development. Tourism policies that encourage the process of managing the distribution and redistribution of tourism resources to need to be based on fair and democratic principles and open to public participation and widespread public control or what is termed democratic governance involving 1) Tourist, 2) Tourism industry, 3) Supporting tourism services, 4) Government, 5) Local communities, 6) Non-governmental organizations (NGOs). To that end, the Destination Management Organization (DMO) policy strategy is the right model for implementing Using tourism development policy in Banyuwangi Regency. DMO is an integrated tourism development system that has the completeness of a system. Namely coordination tourism Stakeholders, destination crisis management, and destination marketing. The results show that DMOs are able to build: 1) Strengthening Stakeholder Collective Awareness Movement. 2) Development of Destination Management. 3) Business Development. 4) Organizational Strengthening and Structuring. The strategy of tourism development policy based on democratic governance through institutional development and cooperation across Stakeholders through the concept of Destination Management Organization can achieve good results.

**Keyword:** Strategy, DMO, development, Using Tours

## Pendahuluan

Jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan tiga berlian tersebut, menurut catatan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, setiap tahun terus meningkat. Sepanjang tahun 2010 ini, jumlah wisatawan mancanegara tercatat sekitar 13.054 orang, sedangkan wisatawan Nusantara sekitar 257.710 orang pada 24 lokasi menjadi sasaran kunjungan para wisatawan. Namun, yang diminati banyak wisatawan asing hanya sembilan lokasi, yakni Desa Wisata Using (Kemiren), Gumuk Kantong Indah, Kaliklatak, Kawah Ijen, Mangrove Blok Bedul, Mirah Fantasi, Plengkung (Taman Nasional Alas Purwo), Sukamade (Taman Nasional Meru Betiri), dan Watudodol, artinya diantara sembilan lokasi tersebut wisata budaya using di desa wisata *using* masuk kategori diminati kunjungan wisatawan mancanegara sampai saat ini.

Pengembangan potensi wisata tersebut tidak mampu berjalan optimal karena dalam kebijakan pengembangan wisata terutama wisata budaya *using* masih menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, artinya pelibatan *Stakeholders* diluar pemerintah terutama masyarakat masih kurang. Oleh karena itu sebagaimana dilansir dalam media online <http://www.antarajatim.com> Bupati Banyuwangi berharap agar *Stakeholders* pariwisata di Banyuwangi harus kompak agar sektor pariwisata tumbuh dan memberi *multiplier effect* yang luas bagi kesejahteraan masyarakat” (Antara, 25 Sept 2012).

Berdasarkan pemahaman tersebut bahwa proses pengembangan pariwisata bergantung pada upaya dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama pihak *Stakeholders* di bidang kepariwisataan. Untuk itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam *Pacific Ministers Conference on Tourism and*

*Environment* di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan *equity inter* dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan (Dirjenpariwisata, 2004).

Dengan kata lain bahwa dalam kebijakan kepariwisataan harus mampu mendorong proses distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan demokratis. Mekanisme pengelolaan yang didominasi oleh otoritas negara jelas tidak menjadi jaminan tunggal bagi bekerjanya prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yaitu "Pariwisata haruslah dilihat sebagai sumber daya lokal), sehingga pengelolaannya bukan hanya harus didasarkan pada kepentingan masyarakat lokal tetapi juga pada kemampuan mereka menyediakan tenaga dan modal sosial yang lain (Brohman, 1996: 60).

Selama ini paradigma pengembangan pariwisata lebih bersifat urusan kepentingan pemerintah untuk mengejar pemasukan bagi PAD atau urusan privat bagi pelaku industri yang berinvestasi dalam pengelolaan wisata, daripada urusan hajat hidup orang banyak terutama di daerah tujuan wisata. Pemerintahan kabupaten Banyuwangi melalui programnya ingin menjadikan kawasan Using sebagai salah satu produk utama tujuan wisata di kabupaten Banyuwangi dengan berbagai potensi wisata terutama seni tradisi yang berkembang dalam kebudayaan Using diantaranya adalah *kuntulan, janger, angklung, idher bumi, barong, seblang* dan *gandrung* penuh dengan syair dan iringan musik yang populer memiliki keunikan dan menjadi daya tarik wisatawan selama

ini. Seni tradisi atau kebudayaan yang ditawarkan sebagai atraksi wisata ini lahir dari dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam kebijakan pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai sumber daya lokal dan juga kemampuan masyarakat menyediakan tenaga dan modal sosial atau berpartisipasi dalam pengembangan wisata tersebut (Brohman, 1996: 60).

### Kajian Pustaka

#### Seni Tradisi sebagai Komoditas Pariwisata Budaya

Tulisan Triono Saputro (2005) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Seni Tradisi dalam Industri Pariwisata Budaya dijelaskan bahwa seni tradisi dapat berwujud sebagai (1) seni tradisi ritual untuk upacara-upacara keagamaan dan adat, dan (2) seni tradisi yang dikemas khusus untuk dinikmati masyarakat luas maupun wisatawan (*arts for mart*). Mengenai pengembangan seni tradisi sebagai suatu komoditas pariwisata budaya, pada umumnya paket pariwisata budaya dijual oleh travel biro atau hotel sebagai produser atau *event organizer* dan mereka lebih berperan besar dalam pengantaran seni tradisi sebagai komoditas wisata dari pada masyarakat sebagai pemilik seni tradisi.

Untuk menilai sejauh mana posisi tawar masyarakat seni tradisi Triono Saputro (2005) menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen PPM bekerja sama dengan Yayasan Seni Taratak, di 10 provinsi di Indonesia (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jambi, Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Sebelum itu Lembaga Manajemen PPM pada periode tahun 2000 – 2001 telah melakukan

pengamatan mendalam di beberapa organisasi seni tradisi di Bali, Yogyakarta, Solo, Bandung, Jambi, dan Padang. Adapun hasil penelitian maupun pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa posisi tawar masyarakat seni tradisi relatif lemah dibandingkan dengan para produser sebagai pembelinya.

Kawasan Using memiliki beberapa seni tradisi yang berkembang diantaranya adalah *kuntulan*, *janger*, *angklung*, *idher bumi*, *barong*, *seblang* dan *gandrung* penuh dengan syair dan iringan musik. Kelahiran seni tradisi ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan masyarakat setempat. Seni-seni itu hadir tidak jauh dari keseharian hidup mereka. Menurut Sutarto (2003) masyarakat Using bukan hanya ulet dan mahir dalam bercocok tanam melainkan juga piawai dalam berkesenian. Eksistensinya bukan hanya membuat Kabupaten Banyuwangi menjadi gudang pangan, melainkan juga gudang produk-produk kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Timur. Produk-produk kebudayaan Using memiliki peranan strategis, baik yang bermuatan kultural maupun ekonomi. Jika dikelola, dibina, dan dimanfaatkan dengan baik, produk-produk kebudayaan Using dapat memberi kontribusi yang berarti bagi baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Perlu diperhatikan bila pengelolaan kebudayaan sebagai komoditas wisata jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat akan berpotensi membawa dampak negatif dimana komersialisasi seni tradisi juga berakibat pada pendangkalan dan pelecehan terhadap seni tradisi itu sendiri dan bahkan memungkinkan daya tawar masyarakat tradisi menjadi lemah akibatnya pengembangan

pariwisata justru memarginalkan peran masyarakat itu sendiri. Henry (2004:307) menyampaikan bahwa beberapa kasus menunjukkan massa yang pasif bukan berarti tidak mampu bersikap negatif jika mereka mengetahui akan terbebani atau sudah menerima akibat negatif dari tindakan pihak lain, sehingga dapat mempunyai potensi yang mengganggu stabilitas operasi suatu kegiatan, baik program pemerintah maupun operasi perusahaan yang mengakibatkan eksternalitas negatif. Oleh karena itu dalam kebijakan kepariwisataan dibutuhkan solusi berupa alternative kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata Using yang berbasis *Democratic governance* yaitu Kebijakan yang secara substansi mensyaratkan pengelolaan pengembangan pariwisata dengan memperhatikan kepentingan dan peran strategis *Stakeholder* terutama masyarakat, sehingga domain keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya pariwisata dapat diisi secara proporsional.

### **Kebijakan Kepariwisataan**

Berbagai definisi tentang kebijakan kepariwisataan dikemukakan oleh ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah peningkatan

kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Dalam kajian kepariwisataan yang disampaikan oleh Janianto Damanik (2005) melalui artikel yang berjudul Kebijakan Publik dan Praksis *Democratic Governance* di Sektor Pariwisata dikemukakan persoalan yang sering muncul dalam kebijakan kepariwisataan adalah bahwa kebijakan tersebut disusun berdasarkan pada paradigma pembangunan yang menguatkan sekelompok orang (elit lokal, dan kapitalis global). Ini berarti bahwa negara mendefinisikan sendiri kebijakan pembangunan pariwisata, meskipun implementasi kebijakan itu di lapangan sebenarnya banyak mengalami distorsi, sebab hasil akhir yang menyolok adalah marjinalisasi kelompok miskin dalam proses-proses distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata (Dahles dan Bras, 1997: 66). Ketika itu terjadi sesungguhnya garis demarkasi antara kebijakan publik dan kebijakan nonpublik telah hilang, sehingga kebijakan (pariwisata) itu sendiri kehilangan watak publiknya (Priyono, 2004: 123-124).

Dalam berbagai kasus kebijakan seringkali tidak dapat menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal sesuai harapan mengenai tiga macam pertanyaan sebagaimana yang dikatakan oleh Parsons (2005), yaitu (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Oleh karenanya diperlukan model rasional dalam proses perumusan kebijakan dan proses kebijakan yang lainnya. Dror dalam Wahab (2008:100) menegaskan bahwa dalam hubungan

agar diperoleh kebijakan yang rasional, maka yang diperlukan oleh pembuat kebijakan adalah:

1. Mengetahui seluruh nilai-nilai masyarakat beserta pemberian bobotnya.
2. Mengetahui secara tepat alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia.
3. Mengetahui semua akibat yang mungkin terjadi dari setiap alternatif kebijakan yang dipilih.
4. Menghitung nisbah antara nilai yang dicapai oleh masyarakat dengan korban yang sudah diberikan oleh mereka bagi setiap alternatif kebijakan yang dipilih.
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Alternatif kebijakan mana yang paling baik dalam rangka mencapai tujuan. Sehubungan itu, Patton dan Sawicki (Keban, 2008) mengemukakan beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yaitu : Pertama, *Technical Feasibility*, mengukur apakah alternatif kebijakan yang terpilih akan berjalan sesuai dengan syarat teknis tujuan yang ditetapkan. Kedua, *Political Viability*, terdiri dari 5 (lima) sub kriteria yaitu : *Acceptability* yang berhubungan dengan apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat, *Appropriateness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan tidak akan merusak atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, *Responsiveness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, *Legal* dalam pengertian apakah suatu alternatif kebijakan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta *Equity* menekankan

kriteria alternatif kebijakan pada keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Ke tiga, *Administrative Operability*, yang menyangkut penilaian terhadap beberapa elemen administrasi seperti *Authority*, *Institutional Commitment*, *Capability*, *Organizational Support*.

### **Democratic Governance dalam Pengembangan Pariwisata**

Pudarnya watak publik dalam kebijakan pariwisata ini membawa dampak pada ketidakberdayaan masyarakat dalam merespon perkembangan pasar wisata, sehingga peran masyarakat bukan lagi sebagai *Stakeholders* dan *shareholders* tetapi tetap menjadi penonton ditengah keramaian pemodal yang merebut peluang ekonomi pasar wisata. Di tingkat praksis pengelolaan distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan demokratis. Mekanisme pengelolaan yang didominasi oleh otoritas Negara jelas tidak menjadi jaminan tunggal bagi bekerjanya prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) karena sesungguhnya "Negara bukanlah pilar tunggal pembangunan Pariwisata" (Elliot, 1997 : 6). Pariwisata haruslah dilihat sebagai sumber daya lokal (Brohman, 1996: 60), sehingga pengelolaannya bukan hanya harus didasarkan pada kepentingan masyarakat lokal tetapi juga pada kemampuan mereka menyediakan tenaga dan modal sosial yang lain (baca: partisipasi).

Berdasarkan pemahaman tersebut kebijakan kepariwisataan harus mampu mendorong proses pengelolaan distribusi dan redistribusi sumber daya pariwisata dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan demokratis serta membuka diri

terhadap partisipasi publik dan kontrol publik secara luas atau apa yang diistilahkan dengan *democratic governance* (Damanik, 2005).

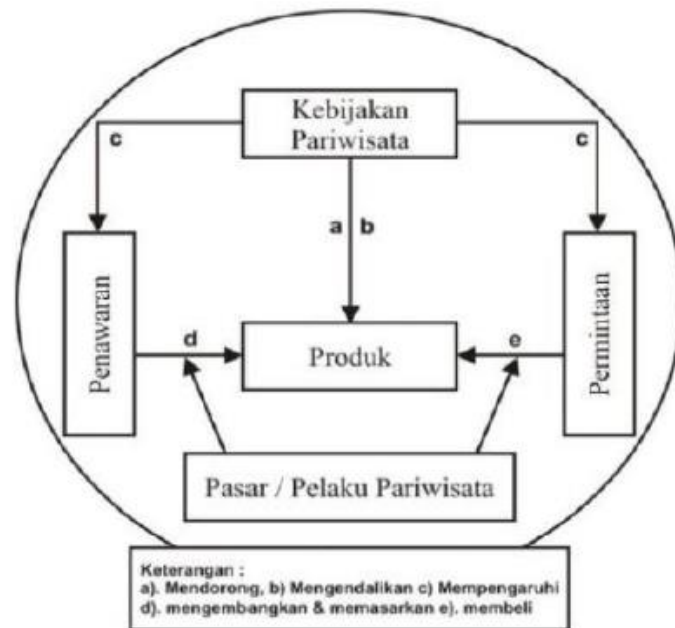
Prinsip *democratic governance* dalam pengembangan pariwisata mensyaratkan adanya pengakuan bahwa semua *Stakeholder* memiliki peran-peran khusus yang jika diingkari akan mengakibatkan merosotnya kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan. Tanpa pemerintah akan mustahil tersedia infrastruktur dasar bagi pengembangan kepariwisataannya mulai dari sarana dan prasarana fisik hingga ke kelembagaan (Elliott, 1997 : 5-56). Infrastruktur yang tersedia tidak berfungsi optimal apabila sektor swasta tidak melakukan investasi dan promosi. Juga sulit membayangkan pariwisata berkembang apabila masyarakat lokal tidak mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki sebagai atraksi wisata. Itulah sebabnya di dalam perencanaan perlu diakomodasi beragam kepentingan yang diartikulasikan secara berbeda namun memiliki nilai yang sama.

Pengelolaan sumber daya pariwisata sektor publik secara demokratis dapat tercapai, terutama jika tiga syarat berikut ini dapat dipenuhi (Elliott, 1997 : 40-44). Pertama, Peran strategis *Stakeholders* didefinisikan secara jelas dan dijalankan secara konsisten yakni siapa melakukan apa dan dengan konsekuensi bagaimana. Kedua, ada aturan main yang jelas, mengikat dan adit bahwa pemanfaatan sumber daya pariwisata harus ditinjau setiap saat apabila hasilnya merugikan salah satu pihak. Ketiga, sumberdaya pariwisata dikelola secara transparan dan akuntabel.

*Stakeholders* yang pariwisata yang terlibat di dalam pasar pariwisata antara lain (Damanik dan Weber 2006):

1) Wisatawan, 2) Industri pariwisata, 3) Pendukung jasa pariwisata, 4) Pemerintah, 5) Masyarakat local, 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Stakeholders* tersebut berperan sebagai elemen pendukung pariwisata yang kemudian berinteraksi membentuk suatu sistem yang disebut sistem pariwisata. Sistem pariwisata memiliki empat unsur pokok yang saling terkait

yaitu permintaan atau kebutuhan, penawaran atau pemenuhan kebutuhan, pasar dan kelembagaan yang berperan untuk fasilitas keduanya, dan pelaku/aktor yang menggerakkan ketiga elemen sebelumnya (Damanik dan Weber 2006). Hubungan diantara unsur-unsur pokok pariwisata dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Sistem Kepariwisataan

(Steck *et al.* 1999 dalam Damanik dan weber 2006)

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case Study*), yaitu kebijakan pengembangan

pariwisata apa yang paling efektif, akseleratif dan berbasis *Democratic Governance* untuk dilakukan dalam upaya mengembangkan kawasan wisata Using di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di kawasan wisata Using di desa Kemiren Kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para *Stakeholders* yang terlibat dalam

proses pengembangan kawasan wisata Using.

Sedangkan teknik pengumpulan data; dilakukan melalui Observasi dan dokumentasi, wawancara mendalam, Kuisisioner, studi pustaka, dan FGD. Dimana Penilaian data; dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas (kesahihan), obyektivitas, reliabilitas (keandalan) dengan cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan dengan tehnik triangulasi. Sedangkan Interpretasi data; dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahamanintelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel/grafik/diagram, untuk melakukan penyimpulan data terhadap hasil interpretasi data dan analisis data.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian di lapangan terdapat empat alternatif kebijakan, yaitu; 1) pengembangan obyek atau atraksi wisata, 2) pengembangan pelayanan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, 3) pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta 4) pengembangan kelembagaan dan kerjasama dalam pengelolaan wisata. Keempat alternatif kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya harus memaksimalkan keterlibatan *Stakeholder* yang dibangun melalui relasi yang didasari nuansa rasa memiliki terhadap wisata using sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga paska operasi/kegiatan pengembangan.

Kebijakan pengelolaan wisata selama ini tidak ada kesinambungan sistem yang membentuk masing-masing unsur dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu model Destination Management Organization (DMO) merupakan model yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata Using di kabupaten Banyuwangi. DMO Merupakan sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang memiliki kelengkapan sebagai sebuah sistem.

Ada tiga komponen penting dalam DMO, yaitu *coordination tourism Stakeholders, destination crisis management dan destination marketing*. Dalam konteks pengembangan Wisata di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa hal yang dilakukan dalam membangun DMO diantaranya adalah:

#### 1. Penguatan Gerakan Kesadaran Kolektif *Stakeholder*

Tahap ini merupakan proses awal pembentukan DMO dengan melakukan studi kelayakan untuk menentukan pemangku kepentingan di destinasi serta memulai penyusunan Tourism Management Plan (TMP). Selanjutnya perlu diadakan konsultasi dengan pihak publik dan pemerintah untuk mendapatkan masukan dan ide terkait dengan konsep DMO yang sesuai untuk pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Diharapkan muncul kesadaran bersama mengenai perlunya DMO sebagai wadah bagi para pengelola destinasi pariwisata. Tahap ini akan menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk konsep DMO yang diinginkan bersama. Selain itu, konsep awal TMP yang dilandasi oleh komitmen bersama, dapat terwujud untuk disempurnakan pada tahap selanjutnya.



Modal dasar yang sudah dimiliki adalah bahwa sinergi antar *Stakeholders* dan pertemuan antar *Stakeholders* dalam kegiatan event dan promosi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sudah dijalankan. Bahkan sudah ada MoU antara Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Se-Kabupaten Banyuwangi. Modal dasar ini tinggal dikembangkan atau diikat menjadi konsep DMO yang diinginkan bersama dan dilandasi oleh komitmen bersama.

## **2. Pengembangan Manajemen Destinasi**

Tahap ini meliputi intervensi awal, keuangan dan ikatan-ikatan formal, baik intervensi pengembangan yang dilakukan bersama oleh lintas sektor maupun pemangku kepentingan daerah. Intervensi awal juga terwujud dalam bentuk rekomendasi Pemerintah daerah. Ketika Pemerintah menyetujui pembentukan kelembagaan DMO maka perlu dipertimbangkan aspek sarana prasarana, investasi dan *capacity building*. Pada saat yang bersamaan, konsultasi dana segera dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas pembentukan kelembagaan. TMP juga telah teridentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif untuk jangka pendek dan menengah. Maka hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah intervensi para pemangku kepentingan dalam hal penataan destinasi (fasilitas,

aksesibilitas dan masyarakat), *capacity building* dan penyusunan TMP yang dilandasi komitmen pembentukan DMO.

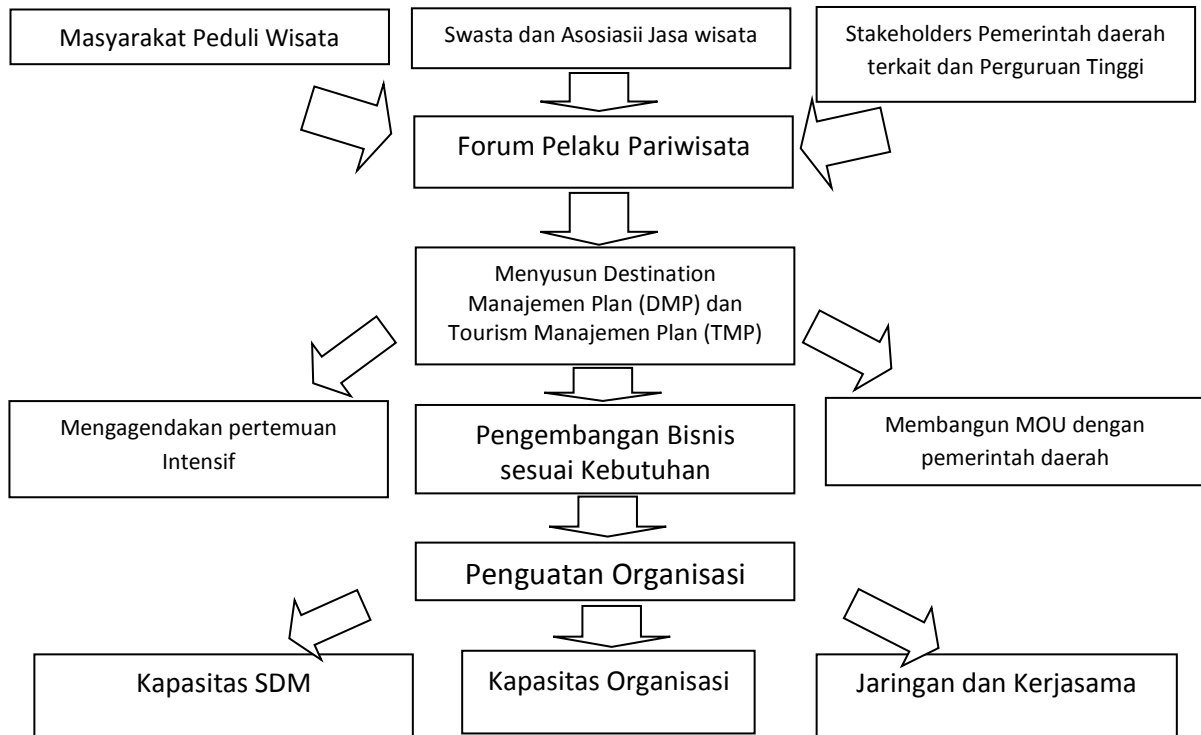
## **3. Pengembangan Bisnis**

Tahap ini meliputi peningkatan kapasitas usaha/industri, perencanaan bisnis dan jaringan, pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan *backward* dan *forward linkage*. Pada tahap ini, upaya peningkatan kapasitas tersebut saling terkait dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha serta pemerintah.

## **4. Penguatan dan Penataan Organisasi**

Tahap berikutnya agar tata kelola destinasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien adalah penguatan struktur organisasi (forum kerja) yang telah memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab kegiatan DMO. Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah keberlanjutan usaha di destinasi, peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata yang transparan, akuntabel dan sistemik baik secara manajerial maupun finansial. Selain itu, pengelolaan juga dianggap telah siap ketika telah menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Share Value (CSV)*. Proses dan tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar Model Destination Management Organizations dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wisata Using berbasis Democratic Governance**



### Kesimpulan

1. Masyarakat Using dikenal sangat kaya akan kebudayaan yang menggambarkan filosofi manusia dari hidup sampai meninggal dan tersebar di beberapa kecamatan, namun yang masih kuat dalam menjaga tradisi *using* adalah Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Oleh karena pada tahun 1995 desa kemiren ditetapkan sebagai destinasi wisata yang menjadikannya sebagai Desa wisata/ Kawasan wisata *using*.
2. Potensi Wisata *using* di Desa Kemiren yang mampu dikemas dalam atraksi wisata *using* yang mempunyai nilai daya tarik wisata dan *marketable* hanya di empat tempat yaitu : Anjungan / Taman Rekreasi desa Using, Sanggar Genjah Arum, Sanggar Barong

Lancing sapu Jagat, Sanggar barong Tresno Budoyo. Selebihnya menjadi ritual-ritual adat masyarakatnya, diadakan di waktu-waktu tertentu artinya tidak mesti bisa dinikmati wisatawan setiap saat.

3. Pengembangan kawasan wisata *using* di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara lintas sektor dengan keterlibatan multi *Stakeholders* sebagai aktualisasi pengembangan wisata berbasis *democratic governance* artinya pengembangan wisata bukan dominasi pemerintah tetapi semua unsur terlibat secara berkesinambungan dan bersinergi dalam membangun kawasan wisata *using*.
4. Untuk memaksimalkan keterlibatan *Stakeholder* dalam

- pengembangan wisata using dibangun relasi yang didasari nuansa rasa memiliki terhadap wisata *using* sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca operasi/kegiatan pengembangan.
5. Untuk memaksimalkan pengembangan wisata *using* di kabupaten Banyuwangi terdapat alternatif strategi kebijakan pengembangan yaitu pengembangan daya tarik wisata objek dan atraksi wisata, pengembangan pada fasilitas atau ketersediaan fasilitas pelayanan, serta pengembangan informasi dan promosi wisata.
  6. Model pengembangan tersebut dalam prakteknya disesuaikan dengan konteks kondisi obyek wisata sesuai dengan persoalan yang ada pada masing-masing obyek wisata dan tidak meninggalkan tata ruang dan nilai-nilai kearifan dan keunikan lokal dari masyarakat *using*.
  7. Salah satu permasalahan yang krusial dalam pengembangan wisata di daerah adalah adanya *misscommunication* dalam pengembangan suatu objek wisata, yaitu muncul kesan seolah-olah pemerintah, swasta dan masyarakat sulit duduk dalam satu entitas baru untuk memajukan pariwisata oleh karena itu strategi pengembangan kelembagaan dan kerja sama dalam pengembangan wisata *using* menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan.
  8. Model kebijakan pengembangan wisata using yang berbasis *democratic governance* yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan kelembagaan dan kerja sama lintas *Stakeholders* melalui konsep *Destination Management Organization*

## Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan keterlibatan *Stakeholder* dalam pengembangan wisata *using* dengan memfasilitasi pertemuan para pelaku wisata yang potensial dalam pengembangan wisata *Using*.
2. Pertemuan para pelaku wisata harus ditumbuhkan kesadaran kolektif dan didorong terbentuknya *Destination Management Organization* dalam pengembangan wisata *Using*.
3. Perlu disusun Destinasi Manajement Plan dan *Tourism Manajemen Plan* dalam pengembangan wisata *using*.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keijakan Negara, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Biederman, Paul S., Jun Lai, Jukka M. Laitamaki, Hannah R. Messerli, Peter D. Nyheim, dan Stanley C. Plog, 2007, Travel and Tourism: An Industry Primer, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.
- Brohman, J, 1996, New Directions in Tourism for Third world Development. *Annals of Tourism Research*, Vol. 23 No. 1, hal. 48-70.
- Dahles, H. dan Bras, K 1997, The State, the Market, and the Role of NGOs in the Establishment of Sustainable Tourism Development: a Discussion. Dalam Dahles, H (ed), *Tourism, Small Entrepreneurs and Sustainable Deelopment; Cases*

- from Deaeloping Countries.  
Tilburg: ATLAS, hal 65-73i.
- Dahles, H. dan Bras, K. (ed) (1999).  
Tourism and Small  
Entrepreneurs: Development,  
National Policy and  
Entrepreneurial Culture,  
Indonesian Cases. New York:  
Cognizant Communication  
Corporation.
- Damanik, Janianton dan Helmut F  
Weber,2006, *Perencanaan  
Ekowisata: dari Teori ke  
Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Ofset
- Damanik, Janianton,2005, Kebijakan  
Publik dan Praksis Democratic  
Governannce di Sektor  
Pariwisata, Jurnal Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Volume 8,  
Nomor 3,UGM, Yogjakarta
- Elliot, J, 1997, *Tourisme: Politics and  
Public Sector Management*,  
London, New York: Routledge.
- Keban, Yeremias. T. 2008. Enam  
Dimensi Strategis Administrasi  
Publik Konsep, Teori dan Isu.  
Yogyakarta: Gava Media
- Parsons, Wayne. 2005. Public Policy:  
Pengantar Teori dan Praktik  
Analisis Kebijakan (terjemahan).  
Jakarta: Kencana
- Priyono, H. B. (2004). 'Mencari Badan  
Publik: Refleksi bagi  
Rehabilitasi Arti Pembangunan.  
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Vol. 8 No. 2, hal. 109-  
138.
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen  
Sumber Daya Manusia. Cetakan  
Pertama. STIE YKPN.  
Yogyakarta
- Singarimbun M, Sofian E. 1989.  
Metode Penelitian Survai.  
Jakarta [ID]: LP3ES.
- Sutarto. 2003. "Etnografi Masyarakat  
Using". Laporan Penelitian.  
Surabaya: Dinas P dan K  
Provinsi Jawa Timur.
- Triono, Saputro (2005),  
Pemberdayaan masyarakat Seni  
Tradisi dalam Industri  
Pariwisata
- <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/95887/pariwisata-banyuwangi-raih-travel-club-tourism-award>